

OMBUDSMAN PB: TIDAK ADA TRANSPARANSI TERKAIT HASIL CPNS/P3K 1.283 ORANG

Kamis, 06 Agustus 2020 - Nina Loussiana Lalenoh

MANOKWARI, KLIKPAPUA.COM - Tidak adanya transparansi terkait hasil kelulusan CPNS 1.283 orang, yang terdiri dari 1.283 CPNS dan 521 P3K, mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Musa Yosep Sombuk mengatakan ada dua minggu setelah pengumuman hasil tes CPNS Provinsi Papua Barat, pihaknya sudah melakukan deteksi lebih awal, karena sebelumnya sudah ada informasi bahwa ada banyak pegawai honorer di Pemprov Papua Barat yang tidak sebenarnya berhak muncul.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat karena memang dia APIP, karena kami ORI eksternal, sehingga kami berkoordinasi dengan APIP, di APIP juga didapatkan indikasi yang sama, sehingga Ombudsman berusaha menghubungkan daerah baik Gubernur maupun Sekda untuk memberikan perhatian terhadap info tersebut," ujar Musa saat ditemui di ruang pers Kantor Ombudsman, Kamis (6/8/2020).

Menurut Musa, sampai dengan pengumuman, muncul laporan-laporan malah sekarang lengkap dengan materinya, hingga Ombudsman sudah mendapat 7 laporan dari berbagai instansi yang berada di Pemprov Papua Barat, di dalamnya berisi laporan mengenai pegawai-pegawai yang tidak dikenal sebelumnya yang tidak ada dalam pegawai honorer yang aktif bekerja.

"Sehingga yang menjadi pertanyaan kami di Ombudsman, mana pengumuman pasti ada pejabat gubernur yang menandatangani memiliki lampirannya berupa daftar nama-nama, namun sampai sekarang saya belum lihat barang itu, biasanya diumumkan di media online maupun media TV, contoh seperti Pegaf yang bisa menampilkan nama-nama yang lulus," ungkapnya.

Musa mengatakan dari sisi transparansi menjadi pertanyaan besar sehingga adanya indikasi selipan-selipan atau istilahnya 'selip' kemudian mendapat penguatan lagi dari satu sisi lagi bahwa tidak ada pengumuman terbuka siapa sebenarnya yang lulus dan kerja dari kapan, terutama usianya 35 tahun. Sehingga semakin besar kecurigaan publik terhadap sesuatu yang tidak transparan.

"1.283 itu siapa saja namanya, dari unit kerja mana, mengabdikan selama berapa tahun, namun sampai hari ini tidak ada transparansi sehingga muncul kecurigaan publik, kemudian segala rumor itu muncul dengan adanya mafia honorer. Di sana ada orang-orang pejabat negara yang berwenang melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan yang ada, ada kecurigaan tentang perubahan umur, merubah tahun lahir misalnya supaya masuk di bawah rentang waktu/usia 35 tahun, kemudian membuat SK yang tadinya tidak ada menjadi ada SK," ungkap Musa.

Â

ORI Papua Barat sudah mendapat laporan dari berbagai instansi yang mana orang-orangnya yang melapor tahu bahwa kantornya disertai dengan alat-alat bukti yang mereka punya. Padahal konteksnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berintegritas yang katanya bebas dan masuk zona anti korupsi.

"Ombudsman berwenang untuk melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi, karena penerimaan pegawai adalah bagian dari pelayanan administrasi pemerintahan. Kalau administrasi model begini ada pihak-pihak yang dirugikan, beberapa di antaranya pegawai honorer aktif yang sudah saatnya diangkat hilang dari daftar," jelasnya.

"Pejabat-pejabat yang berwenang diberikan tanggung jawab oleh Negara untuk mengelola penerimaan pegawai ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ada indikasi persoalan pidana. Kalau sudah kerja di sana ada pelanggaran, pemalsuan dokumen dan ada suap pejabat, yang berwenang berkewajiban untuk menjaga sesuai dengan tupoksi dan janji-Nya," jelasnya.

Ombudsman dalam hal ini sudah menerima laporan dan akan melakukan klarifikasi terhadap laporan masyarakat ini. Berapa Ombudsman tidak punya kewenangan untuk menindak, namun akan meneruskannya ke pihak-pihak yang berwenang.

"Untuk bagian itu kami sudah berkoordinasi dengan Polda Papua Barat, apabila kita menemukan tindakan pelanggaran, akan diteruskan ke pihak kepolisian yang berwenang, tidak akan kita sembunyikan barang itu, karena ini barang milik Negara, dipertanggungjawabkan seperti kacang goreng," tegasnya.

"Intinya saya mau bilang, kami sudah menerima pengaduan dan kami akan bekerja sesuai tupoksi dan metode kerja kami. Kalau menemukan ada yang di luar peraturan berlaku kami akan sampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mengoreksi."

memperbaikinya mumpung sekarang masih dalam proses pemberkasan," tegasnya lagi.

Ombudsman sangat menyayangkan model mengelola penerimaan pegawai seperti ini, harusnya nama-nama itu diumumkan terbuka sesuai peraturan. "Semua sudah jelas, ada data sudah jelas umumkan terbuka siapa-siapa yang berhak diusulkan dari jalur honorer, sehingga jangan menimbulkan multitafsir yang menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga terjadi malapetaka." ujarnya.

Rumor yang ada di masyarakat bahwa terjadi permainan yang tidak wajar di dalam penerimaan ini, menurutnya, itu karena yang tidak transparan. "Undang-undnag transparansi publik itu diwajibkan, yang perlu diumumkan, maka diumumkan. Pengumuman informasi yang harus dibuka di publik, tidak boleh disembunyikan. Kalau disembunyikan berarti itu masuk dalam pidana untuk orang mengadu dan kemudian melakukan kiam sehingga mendapat penjelasan," pungkasnya.

Sumber : <https://klikpapua.com/papua-barat/manokwari/ombudsman-pb-nama-nama-1-283-honorer-yang-dinyatakan-lulus-l>